

**ANALISIS YURIDIS VALIDITAS ATAS PENETAPAN
PERHITUNGAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020 DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN
HASIL LANJUTAN**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan
145/PHP.BUP-XIX/2021 serta Studi Perbandingan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008)



Oleh:

NAMA : ADIWIJAYA BAKTI

NIM : 1902190082

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Tahun 2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Adiwijaya Bakti
NIM : 1902190082
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Yuridis Validitas Atas Penetapan Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Hal Terjadi Perselisihan Hasil Lanjutan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan 145/PHP.BUP-XIX/2021 serta Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,


Adiwijaya Bakti



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

JUDUL:

ANALISIS YURIDIS VALIDITAS ATAS PENETAPAN PERHITUNGAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN HASIL LANJUTAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan 145/PHP.BUP-XIX/2021 serta Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008)

Nama : Adiwijaya Bakti
NIM : 1902190082
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Oktober 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H

Program Studi Magister Hukum

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Manotar Tampubolon, S.H, M.H

Program Pasca Sarjana

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA






PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 14 Juli 2022, telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Adiwijaya Bakti
NIM : 1902190082
Program Studi : Program Studi Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul: Analisis Yuridis Validitas Atas Penetapan Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Hal Terjadi Perselisihan Hasil Lanjutan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan 145/PHP.BUP-XIX/2021 serta Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008)

oleh tim penguji yang terdiri dari:

	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H.	Ketua	
2	Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H.	Penguji	
3	Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Penguji	



Pernyataan Persetujuan Dua Publikasi Tugas Akhir

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Adiwijaya Bakti
NIM : 1902190082
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Yuridis Validitas Atas Penetapan Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Hal Terjadi Perselisihan Hasil Lanjutan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan 145/PHP.BUP-XIX/2021 serta Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta,



Adiwijaya Bakti

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Yuridis Validitas Atas Penetapan Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Hal Terjadi Perselisihan Hasil Lanjutan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan 145/PHP.BUP-XIX/2021 serta Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008)”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Magister serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulis dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis juga sangat dibantu oleh banyak pihak dalam bentuk semangat, pemikiran dan data-data yang diperlukan, oleh karena itu perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.
2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Dr. Bintang R. Simbolon. M.Si.
3. Ketua Program studi MH Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik, Dr. Gindo E.L. Lumban Tobing, S.H., M.H.
4. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dalam Penulisan Tesis Penulis sekaligus sebagai Ketua Tim Penguji.

5. Dr. Manotar Tampubolon, S.H, M.H. sebagai Pembimbing II dalam Penulisan Tesis Penulis sekaligus sebagai Anggota Tim Penguji.
6. Dr. Poltak Siringoringo, S.H, M.H sebagai Anggota Tim Penguji.

Penulis sangat berharap Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan pada akhirnya Penulis menginginkan koreksi dan kritik serta saran yang membangun agar Penulis dapat menyempurnakan kembali penulisan Tesis ini terutama agar dapat bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

Jakarta,



Adiwijaya Bakti



DAFTAR ISI

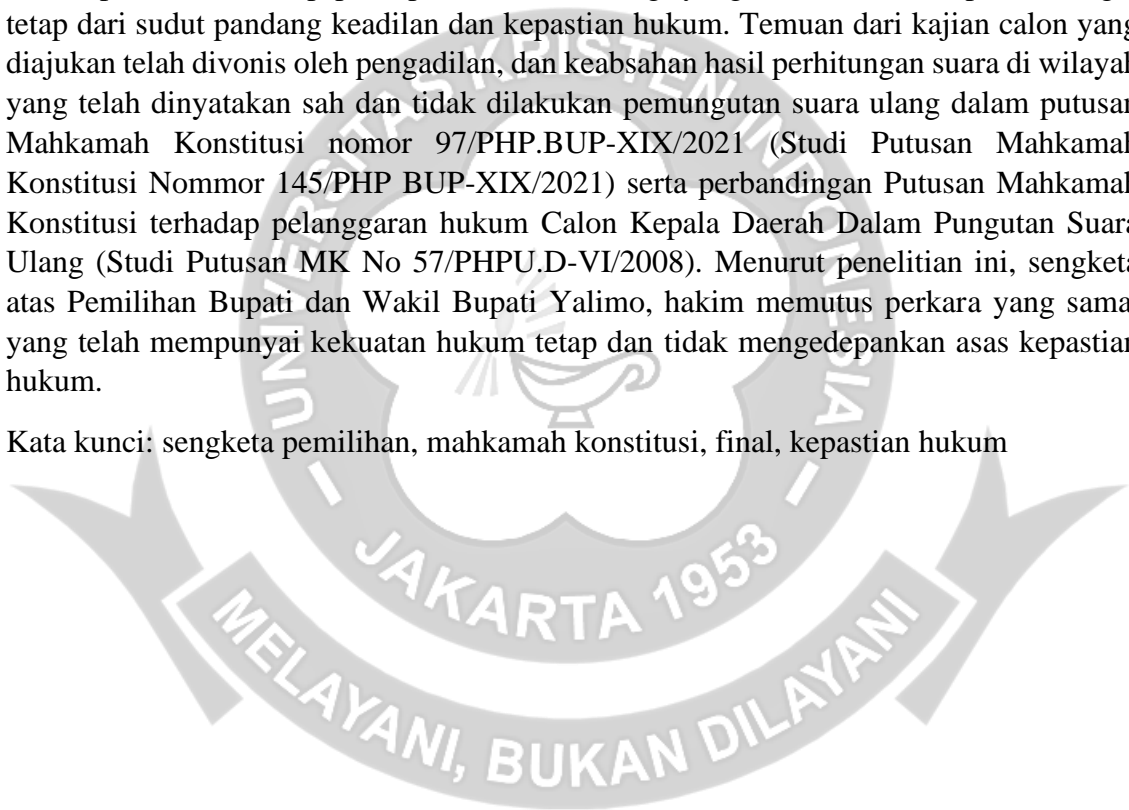
Pernyataan Keaslian Karya tulis akhir	i
Persetujuan Dosen pembimbing tugas akhir	ii
Persetujuan Tim Penguji tugas akhir	iii
Pernyataan Persetujuan dan Publikasi Tugas Akhir	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	
1.3.1 Maksud	9
1.3.2 Tujuan	9
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tahapan Penelitian	10
1.4.2 Metode Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teoritis	
2.1.1 Teori kepastian Hukum	13
2.1.2 Teori Negara Hukum	15
2.1.3 Teori Kewenangan	18
2.1.4 Teori Bernegara	21
2.2 Kerangka Konsep	
2.2.1 Pemilihan Umum	24
2.2.2 Pemilihan Kepala Daerah	30
2.2.3 Asas <i>Erga Omnes</i>	33
2.2.4 Mahkamah Konstitusi	35
2.2.5 Final and Binding	38

2.2.6	Putusan.....	39
BAB III KEABSAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA DISTRIK YANG TELAH DINYATAKAN SAH DAN TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN ULANG PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021		
3.1	Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada	42
3.2	Keabsahan penetapan calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020	50
3.3	Analisis keabsahan hasil perhitungan suara pada Distrik yang telah dinyatakan sah dan tidak dilakukan pemungutan ulang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021	61
BAB IV PENDAPAT MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN SERUPA PADA TAHUN TERDAHULU		
	Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008	77
BAB V PENUTUP		
a.	Kesimpulan.....	85
b.	Saran.....	86
	DAFTAR PUSTAKA.....	87

ABSTRAK

Penelitian ini menguji putusan sengketa yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, pada tahun 2020 yang tidak sesuai prinsip kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengakibatkan kasus memanjang dan berpotensi pemilihan ulang, yang mana masih memungkinkan menghasilkan sengketa. Penulis mendiskusikan konsekuensi pemilihan ulang, yang mana berpeluang menghasilkan sengketa lanjutan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta ketidakpatuhan terhadap prinsip final and binding, yang mana memiliki putusan legal tetap dari sudut pandang keadilan dan kepastian hukum. Temuan dari kajian calon yang diajukan telah divonis oleh pengadilan, dan keabsahan hasil perhitungan suara di wilayah yang telah dinyatakan sah dan tidak dilakukan pemungutan suara ulang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP BUP-XIX/2021) serta perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran hukum Calon Kepala Daerah Dalam Pungutan Suara Ulang (Studi Putusan MK No 57/PHPU.D-VI/2008). Menurut penelitian ini, sengketa atas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, hakim memutus perkara yang sama, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mengedepankan asas kepastian hukum.

Kata kunci: sengketa pemilihan, mahkamah konstitusi, final, kepastian hukum



ABSTRACT

This study examines the disputed decisions made by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia on the election of the Regent and Deputy Regent of Yalimo Regency, Papua Province, in 2020 that do not adhere to the principle of permanent and final legal force. The Constitutional Court's decision on the dispute over the election of the elected Regent and Deputy Regent resulted in a lengthy case due to the possibility of re-election, which still resulted in general election disputes. The author discusses the consequences of re-election, which has the potential for ongoing disputes at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, as well as non-compliance with the principle of final punishment, which has permanent legal force from the standpoint of fairness and justice. Findings from the study of the proposed candidate having been sentenced by the court, as well as the validity of the vote count results in the District that has been declared valid and not re-voted in the Constitutional Court Decision Number 97/PHP.BUP-XIX/2021 (Study of Constitutional Court Decision Number 145/PHP BUP-XIX/2021) and the comparison of the Constitutional Court's Decision to the legal violation of the Regional Head Candidate in the Re-Voting (Study of the Constitutional Court Decision Number 57/PHPU.D-VI/2008). According to this study, in the dispute over the election of Yalimo's regent and deputy regent, the judge decided on the same case, which had permanent legal force and violated the principle of legal certainty.

Keywords: election dispute; Constitutional Court; final; legal force

